

**Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem  
Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Sistem Pengendalian Intern  
(Internal Audit) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan  
Pemerintah Daerah  
(Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Kuantan Singingi)**

**By:**

**Desy Sefri Yensi**

**Dr. H. Amir Hasan Ms, MM.,Ak.,CPA,CAC,CA**

**Yuneita Anisma,SE,M.Si.,Ak.,CA**

**Faculty of economic Riau University, Pekanbaru, Indonesia**

**Email : desy.sefriyensi33@yahoo.com**

**Effect Of Human Resource Competencies, Implementation Areas Of  
Financial Accounting System And Internal Control System  
(Internal Audit) To The Quality Of Local Government  
Financial Statements  
(Empirical Study On SKPDs in Kuantan Singingi)**

**ABSTRACT**

*This study aimed to examine the effect of human resource competencies, implementation areas of financial accounting system and internal control system (internal audit) on the quality of financial reporting by local governments throughout the research object SKPD Kuantan Singingi district numbering 26 on education. The sampling technique using simple random sampling. The method of data collection is by distributing questionnaires. Analysis using multiple regression.*

*The results of this study it is concluded that the competency of human resources and the application of financial accounting systems area positively significant effect on the quality of financial reports while the variable region of the internal control (internal audit) does not affect the quality of local government financial reports.*

*In this study the magnitude of the effect that the  $R^2$  of 0.448 or 44.8% indicated that the competency of human resources and the application of financial accounting system areas affecting the quality of financial reporting area of 44.8%, because in the world of government, every part of government must by right people, which has competence in accordance with the predetermined qualifications. So is the application of financial accounting system has an influence on the quality of the region's financial statements due to the implementation of local area financial accounting system is a medium that can support to produce reliable financial reports and are able to prepare and present the financial statements of qualified regional and meet government quality characteristics of financial statements predefined area. While by 55.2% influenced by other variables.*

**Keywords:** *quality of financial reports, human resources competencies, implementation areas of financial accounting system and internal control system (internal audit)*

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Disetiap negara tentunya terdapat pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang memerlukan tata kelola pemerintah yang baik dan bertanggung jawab. Untuk mengelola pemerintahan dengan baik, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah perlu memiliki kewenangan yang jelas dalam pengelolaannya. Salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah yang bertanggung jawab.

Bentuk media pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintah diatur dalam undang-undang No 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Pada UU No. 17 tahun 2003 tersebut khususnya pada pasal 31, disebutkan bahwa gubernur/bupati/walikota menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan.

Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang direvisi lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Laporan keuangan yang dikatakan berkualitas apabila informasi yang disajikan didalam laporan keuangan dapat dipahami, bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan fakta secara jujur serta dapat diverifikasi.

Informasi laporan keuangan dikatakan berkualitas dan bermanfaat

apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan, sebagaimana disebutkan dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005) antara lain :

1. *Relevan*, memiliki unsur-unsur :
  - a. Manfaat umpan balik (feedback value)
  - b. Manfaat prediktif (redictive value)
  - c. Tepat waktu (timeliness)
  - d. Lengkap
2. *Andal*, memiliki karakteristik berikut :
  - a. Penyajian jujur
  - b. Dapat diverifikasi (verifiability)
  - c. Netralitas
3. *Dapat dibandingkan*
4. *Dapat dipahami*

Ketika informasi yang disajikan didalam laporan keuangan telah sesuai dengan karakteristik kualitatif yang disyaratkan maka kualitas dari laporan keuangan yang dihasilkan akan mudah dipahami dan bebas dari kesalahan-kesalahan yang menyimpang, sehingga para pengguna laporan keuangan akan lebih mudah untuk mengambil keputusan dengan baik. Namun sebaliknya, apabila informasi yang terkandung didalam laporan keuangan yang dihasilkan tidak

sesuai dengan kriteria nilai informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan maka akan banyak menimbulkan permasalahan.

Sebagai contoh, seperti yang telah diungkapkan oleh Badan Pengawasan Keuangan (BPK), Pada IHPS Semester I Tahun 2013, BPK telah memeriksa 597 objek pemeriksaan, yang terdiri atas 519 objek pemeriksaan keuangan, 9 objek pemeriksaan kinerja dan 69 objek pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Temuan kerugian negara dalam pemeriksaan ini menunjukkan masih adanya kelemahan sistem pengelolaan keuangan negara.

Dari hasil pemeriksaan BPK IHPS I Tahun 2013, mengungkap sebanyak 13.969 kasus kelemahan sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp 56,98 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.589 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial yang berpotensi merugikan negara dan kekurangan sebesar Rp10.74 triliun. Ada pun sebanyak 5.474 kasus merupakan kelemahan sistem pengendalian internal, sebanyak 2.854 kasus penyimpangan administrasi dan pemborosan, dan ketidakefektifan sebesar Rp 46,24 triliun. Atas temuan itu, BPK merekomendasikan agar dilakukan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah atau kepada perusahaan negara/daerah. Selain itu, BPK juga merekomendasikan perbaikan system pengendalian internal atau tindakan administrative.

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Riau yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pengawasan Keuangan

(BPK). Namun opini wajar tanpa pengecualian yang diberikan BPK terhadap laporan keuangan kabupaten kuansing bukan berarti bebas dari kesalahan dan kelemahan. BPK RI menemukan permasalahan yakni masih rendahnya kualitas informasi laporan keuangan daerah yang disebabkan oleh pemahaman akuntansi dari penyusun laporan itu sendiri yang berhubungan langsung dengan kompetensi sumber daya manusia, belum diterapkannya secara optimal sistem informasi akuntansi keuangan dan masih lemahnya sistem pengendalian internal.

Permasalahan yang ditemukan dalam sistem pengendalian internal adalah (1) Pemerintah kabupaten kuantan singingi belum membuat peraturan teknis terkait pengelolaan dan manajemen kas, (2) Pengelolaan kas non anggaran belum ditetapkan dan peraturan bupati, (3) proses penyusunan dan penepatan APBD dan APBD perubahan tidak tepat waktu. ([Http://pekanbaru.bpk.go.id](http://pekanbaru.bpk.go.id))

Permasalahan lainnya terkait ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan seperti (1) sisa UYHD TA 2012 terlambat disetor ke kas daerah, (2) terdapat keterlambatan penyetoran potongan perhitungan pihak ketiga TA 2012 pada bendahara umum dan bendahara pengeluaran, (3) terdapat kelebihan pembayaran pada beberapa pos seperti biaya transportasi, akomodasi dan honorarium instruktur/narasumber, honorarium panitian pelaksana kegiatan, (4) denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada dinas cipta karya dan tata ruang belum disetor ke kas daerah, (5) Pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial belum sepenuhnya sesuai ketentuan. ([Http://pekanbaru.bpk.go.id](http://pekanbaru.bpk.go.id))

Berdasarkan fenomena tersebut dapat dinyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah masih belum seluruhnya memenuhi karakteristik kualitatif yang disyaratkan. Sehingga perlunya pembenahan terhadap sistem kerja pada pegawai pemerintah daerah terutama bagian penatausahaan keuangan agar Kualitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan bermanfaat serta bernilai informasi yang akurat. Pada dasarnya banyak faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. namun disini peneliti hanya akan meneliti tentang Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern (Internal Audit).

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, maka Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Apakah Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Apakah Sistem Pengendalian Intern (Internal Audit) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

## 1.3 Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah yang ada, maka Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
- c. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh Sistem Pengendalian Intern (Internal Audit) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

## II. METODE PENELITIAN

### 2.1 Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dikabupaten Kuantan Singingi yang berjumlah 26 SKPD. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *Simple Random Sampling* yaitu teknik pengambilan sample secara acak sederhana (Nur Indriantoro, 2010:124)

### 2.2 Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif sedangkan sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil penyebaran pertanyaan dalam bentuk kuesioner kepada seluruh SKPD Kabupaten Kuantan Singingi.

### **2.3 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik kuesioner. Kuesioner adalah suatu aktivitas pengumpulan data dengan menyebarkan angket berupa suatu daftar pertanyaan tertulis kepada responden terpilih untuk diisi dengan alternative dengan pertanyaan yang telah disediakan. Kuesioner akan dikirimkan langsung oleh peneliti kepada masing-masing responden, dan responden yang terpilih berjumlah 85 responden.

### **2.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

#### **2.4.1 Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1)**

Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakannya tugasnya secara professional, efektif dan efisien (Keputusan Kepala BKN Nomor 46A 2007). Variabel ini menggunakan 9 pertanyaan yang diadopsi dari Keputusan Kepala BKN Nomor 46A 2007 (dalam Devi Roviyantie, 2011)

#### **2.4.2 Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (X2)**

Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, pengolongan, penafsiran, peringkasan transaksi, atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum.

(Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002). Variabel ini menggunakan 10 pertanyaan yang diadopsi dari Pemendagri No. 29 tahun 2002.

#### **2.4.3 Sistem pengendalian intern (X3)**

Penerapan pengendalian intern (internal audit) adalah proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keteladanan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya perundang-undangan. (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006). Variabel ini menggunakan 11 pertanyaan yang diadopsi dari Ikatan Akuntansi Indonesia (2011) (dalam Hayyuning tyas rosdiani, 2011)

#### **2.4.4 Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y)**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kualitas laporan keuangan daerah adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam laporan informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Variabel ini menggunakan 11 pertanyaan yang diadopsi dari PP nomor 72 tahun 2010 tentang SAP (dalam Devi Roviyantie, 2011).

### **2.5 Metode Analisis Data**

#### **2.5.1 Metode Regresi linear berganda**

Adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen (X1, X2, X3) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen

dengan variabel dependen apakah hubungan variabel independen atau dependen berhubungan positif dan negatif.

Dengan persamaan :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana:

Y = Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Variabel Tidak Bebas)

X<sub>1</sub> = Kompetensi Sumber Daya Manusianya (Variabel Bebas)

X<sub>2</sub> = Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Variabel Bebas)

X<sub>3</sub> = Sistem Pengendalian Intern (Internal Audit) (Variabel Bebas)

a = *Nilai Intercept* (Konstan)

b = Koefisien Regresi

e = Kesalahan Pengganggu (*disturbance's error*)

## 2.6 Uji Kualitas Data

### 2.6.1 Uji Validitas

Validitas adalah ketetapan atau kecermatan suatu instrumen dalam pengukuran. Dalam menentukan layak atau tidaknya suatu item yang digunakan, biasanya digunakan uji signifikasn koefisien korelasi pada taraf signifikan 5% artinya suatu item dianggap valid jika berkorelasi signifikan terhadap skor total. Pada penelitian ini untuk uji validitas menggunakan korelasi Bivariate Pearson (Joko, 2010:40)

### 2.6.2 Uji Realibilitas

Uji realibilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah Cronbach's Alpha karena metode ini

cocok digunakan pada skor berbentuk skala (missal 1-5) atau skor rentang (missal 0-50), (Joko, 2010: 46)

## 2.7 Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik digunakan untuk mengetahui apakah model regresi menghasilkan emitor tidak bias yang baik jika memenuhi asumsi klasik yaitu bebas dari Multikolinearitas, Heterokedestistas, Autokorelasi dan memenuhi asumsi Normalitas.

### 2.7.1 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinieritas dapat diteksi dengan menghitung koefisien ganda dan membandingkan dengannya dengan koefisien korelasi antara variable bebas. Sebagai contoh diambil dari kasus regresi X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub>, X<sub>3</sub> terhadap Y. Uji multikolinearitas dengan SPSS dilakukan dengan uji regresi, dengan nilai patokan VIF (*Variance Inflation Factor*) dan koefisien kolerasi antar variabel bebas (Joko, 2010:56)

### 2.7.2 Uji Heterokedastisitas

Heterokedastisitas terjadi dalam regresi apabila varian error (ei) tidak konstan untuk beberapa nilai x. Pendeteksian konstan tidaknya varian error dapat dilakukan dengan menggambar grafik *scatter plot* yaitu dengan melihat pola-pola tertentu pada grafik, dimana sumbu X adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu Y adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya). Apabila garis yang membatasi sebaran titik-titik relatif paralel maka varian dikatakan konstan (Joko, 2010:60)

### 2.7.3 Uji Normalitas Data

Uji Normalitas dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa sampel diambil dari populasi yang berdistribusi normal. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas, antara lain uji chi-kuadrat, Uji Lilliefors dan uji Kolmogorov-Smirnov. Jika Pvalue (sig) > 0.05 maka  $H_0$  tidak ditolak, sehingga dapat disimpulkan data diambil dari populasi yang berdistribusi normal (Joko, 2010 :52).

### 2.7.4 Uji Autokorelasi

uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linier terdapat hubungan yang kuat baik positif maupun negatif antara data pada variable-variable pilihan. Model korelasi yang baik bila tidak terjadi autokorelasi. Untuk menentukan apakah terdapat autokorelasi yang baik maka dilakukan dengan menggunakan nilai Durbin Watson (d) (Umar, 2011: 179),

## 2.8 Uji Hipotesis

### 2.8.1 Uji T (t-test)

Uji ini dilakukan terpisah-pisah untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen

terhadap variabel dependennya. Uji T dilakukan untuk membandingkan  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$  pada tingkat signifikan 5% (0.05). jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka variable bebas dapat menerangkan terikatnya. Artinya ada pengaruh antara variable bebas dengan variable terikatnya.

1. Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  atau p value >  $\alpha$  dikatakan tidak signifikan, dan hipotesis penelitian ditolak
- 2)  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dikatakan tidak signifikan, dan hipotesis diterima

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Pengembalian Kuesioner dan Demografi Responden

#### 3.1.1 Pengembalian Kuesioner

Metode yang digunakan untuk pengumpulan data, yaitu secara langsung. Penyebaran kuesioner dilaksanakan pada tanggal 15 April 2014 sampai dengan tanggal 30 April 2014 dan Keseluruhan kuesioner yang disebar adalah sebanyak 85 kuesioner. Dari seluruh kuesioner yang disebar oleh peneliti, jumlah yang kembali berjumlah 75 ((88,23%) kuesioner dan jumlah kuesioner yang tidak mendapat respon sebesar 10 kuesioner ((11,76%)

**Tabel IV.1 Sampel dan Tingkat Pengembalian Kuesioner**

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang dikirim	85	100%
Kuesioner yang tidak mendapat respon	10	11,76%
Kuesioner yang kembali dan dapat diolah	75	88,23%

#### 3.1.2 Demografi Responden

Dari hasil pengumpulan sampel dapat dijelaskan bahwa responden yang berumur 20-30 tahun berjumlah 19 responden atau 25,33%, 31-40 tahun berjumlah 30 responden atau 40%, 41-50 tahun

berjumlah 23 responden atau 30,67% dan 51-60 tahun Berjumlah 3 responden atau 4%. Responden yang berjenis kelamin laki-laki ada 34 orang atau 45,33% dan yang berjenis kelamin perempuan ada 41 orang atau 45,67%. Responden yang lama

menjabat 1-5 tahun ada 66 orang atau 88%, 6-10 tahun ada 6 atau 8%, 11-15 tahun ada 3 orang atau 4%. Selanjutnya responden yang tingkat pendidikannya SMA/SMK berjumlah 10 orang atau 13,33%, D3 ada 12 orang atau 16%, S1 ada 47 orang atau 62,67% dan S2 ada 6 orang atau 8%.

### 3.2 Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, varians, nilai maksimum dan minimum (Ghozali, 2005). Statistik penelitian ini dapat dilihat pada Tabel IV.3

**Tabel IV.3. Statistik Deskripti**

#### **Descriptive Statistics**

	Mean	Std. Deviation	N
KUALITAS	47.2400	3.68650	75
KOMPETENSI	37.0667	3.01049	75
SISTEM	42.4400	2.74226	75
PENGENDALIAN	43.6000	4.90449	75

*Sumber : Pengelolahan Data Hasil Penelitian*

Dari tabel diatas dapat dilihat, bahwa rata-rata jawaban responden untuk kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang merupakan variabel dependen yang mempunyai rata-rata jawaban responden adalah 47.2400 dengan memperoleh standar deviasi 3.68650. Sedangkan nilai rata-rata jawaban untuk kompetensi sumber daya manusia adalah 37.0667, dengan memperoleh standar deviasi 3.01049. Variabel penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dengan nilai rata-rata jawaban responden 42.4400, dengan memperoleh standar deviasi 2.74226. Variabel pengendalian intern dengan nilai rata-rata jawaban responden 43.6000, dengan memperoleh standar deviasi 4.90449. Dilihat dari standar deviasi masing-masing variabel maka variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang memiliki standar deviasi tertinggi dibandingkan dengan variabel lainnya.

### 3.3 Pengujian Kualitas data

#### 3.3.1 Hasil Uji Validitas Data

Uji validitas data digunakan untuk ketepatan atau kecermatan suatu instrument dalam pengukuran, dalam menentukan layak atau tidaknya suatu item yang digunakan. Dalam penelitian ini pengujian validitas menggunakan korelasi *Bivariate*. Dimana keseluruhan variabel penelitian terdiri dari 41 pertanyaan yang harus dijawab oleh responden. Untuk menentukan valid atau tidaknya pernyataan ini adalah apabila korelasi antara masing-masing indikator terhadap total skor konstruk menunjukkan hasil yang signifikan dengan tingkat signifikansinya 5%  $df = n-2$   $(75-2)=73$   $r_{tabel} = 0,2272$ .

#### 3.3.2 Hasil Uji Reliabilitas Data

Variabel ini akan dikatakan valid jika *cronbach alpha*-nya memiliki nilai lebih besar dari 0,6 dan nilai **Cronbach Alpha** minimal 0,5. Berikut adalah tabel hasil dari



uji reliabilitas dari hasil pengolahan data spss versi 17.00.

**Tabel IV.5. Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Jumlah Item	Koefisien Cronbach Alpha
Kompetensi	9	0,700
Sistem	10	0,804
Pengendalian	11	0,871
Kualitas	11	0,717

Sumber : Data Olahan (2014)

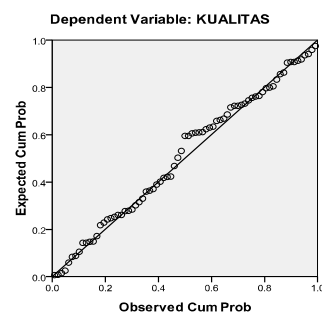
Berdasarkan tabel IV.5 diatas dapat dilihat bahwa koefisien reliabilitas instrumen kualitas, kompetensi, sistem dan pengendalian yang menunjukkan cronbach alpha antara lain 0,717, 0,700, 0,804, 0,871. Dari semua nilai ke empat variabel tersebut menunjukkan bahwa koefisien *cronbach alpha* lebih besar dari 0,6. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua instrumen dalam penelitian ini Realibel.

### 3.4 Hasil Uji Asumsi Klasik

#### 3.4.1 Hasil Uji Normalitas Data

Pengujian normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah rata-rata jawaban responden terdistribusi normal. Hal tersebut dapat diketahui dengan melihat penyebaran titik pada sumbu diagonal grafik *P-P Regression Standardized Residuals*.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



#### 3.4.2 Hasil Uji Multikolonearitas

Uji multikolonearitas dapat dideteksi dengan menghitung koefisien ganda dan membandingkannya dengan koefisien korelasi antar variabel bebas. Uji multikolonearitas dengan SPSS dilakukan dengan uji regresi, dengan nilai patokan adalah nilai *Tolerance* < 0,10 atau *VIF* < 10. Jika *VIF* > 10 maka di anggap terjadi multikolonearitas dengan variabel lainnya, sebaliknya Jika nilai *tolerance* > 0,10 dan *VIF* < 10, berarti tidak terjadi Multikolonearitas antar satu variabel independen yang satu dengan variabel yang lainnya (Ghozali, 2005).

**Tabel IV.6. Nilai Tolerance dan VIF**

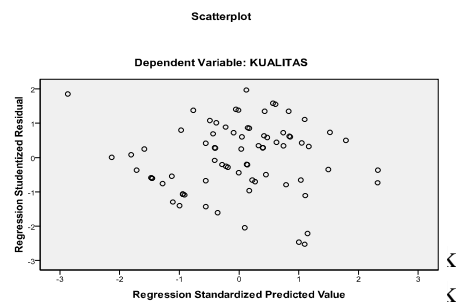
Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Kompetensi	.526	1.899	Bebas Multikolonearitas
Sistem	.897	1.115	Bebas Multikolonearitas
Pengendalian	.567	1.764	Bebas Multikolonearitas

Sumber : Pengolahan Data Hasil Penelitian

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai VIF < 10 untuk semua variabel bebas, begitu juga dengan nilai tolerance < 0,10. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa tidak ada terdapat multikolinearitas antara variabel bebas dala model regresi.

### 3.4.3 Hasil Uji Heterokedastisitas

Heterokedastisitas terjadi dalam regresi apabila varian error (ei) tidak konstan untuk beberapa nilai x. Pendeteksian konstan tidaknya varian error dapat dilakukan dengan menggambar grafik scatter plot yaitu dengan melihat pola-pola tertentu pada grafik, hasil dari penelitian menunjukkan gambar hasil uji Heterokedastisitas.



menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas.

### 3.4.4 Hasil Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi terjadi dalam regresi apabila dua eror et-1 dan et tidak independen. Autokorelasi biasanya terjadi apabila pengukuran variabel dilakukan dalam interval waktu tertentu. Autokorelasi pada penelitian ini dideteksi dengan *Durbin-Watson*. Batas tidak terjadinya autokorelasi adalah angka *Durbin-Watson* berada antara -2 samapai dengan 2.

**Tabel IV.7. Statistik *Durbin-Watson***

Diskriptif	Nilai <i>Durbin-Watson</i>	Keterangan
n =73 , $\alpha = 0,05$	1.792	Tidak terjadi Autokorelasi

*Sumber : Pengolahan Data Hasil Penelitian*

Hal ini telah membuktikan bahwa model analisis memenuhi syarat bebas autokorelasi atau tidak terdapat autokorelasi yaitu berkisar antara -2 sampai dengan +2.

### 3.5 Hasil Analisis Regresi Berganda

Penelitian ini menggunakan metode *enter* dengan bantuan

program atau software SPSS versi 17.0, dimana semua variabel independen digunakan untuk menjelaskan variabel dependen. Dalam penelitian ini, menggunakan model analisis regresi berganda yaitu menggunakan variabel kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pengendalian intern dan kualitas

laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga didapatkan persamaan :

$$Y = \alpha + \beta_1(X_1) + \beta_2(X_2) + \beta_3(X_3) + e$$
$$Y = 8,062 + 0,445X_1 + 0,707X_2 - 0,168X_3 + e$$

### 3.6 Hasil Pengujian Hipotesis dan Pembahasan

#### H1 : Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah

Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat yaitu  $2.988 > 1,6654$  dengan nilai signifikansi sebesar 0,004 dan tingkat kesalahan (alpha) sebesar 0,05. Dari hasil pengujian tersebut, maka terdapat keputusan adalah  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Oleh karena itu, terdapat pengaruh yang signifikan antara kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kompetensi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dikarenakan dalam dunia pemerintah, setiap bagian dalam pemerintah harus diisi oleh orang yang tepat, yaitu yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan kualifikasi yang telah ditentukan. Dalam pengelolaan bagian keuangan harus diisi oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akuntansi dan ilmu-ilmu keuangan terkait lainnya. Jadi, dapat diartikan apabila semakin baik kompetensi sumber daya manusia maka akan semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Devi Roviyantie (2011) yang mengatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Kesignifikanan ini disebabkan karena kompetensi sumber daya manusia bagian keuangan/akuntansi pada Dinas-Dinas di Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya baik, dalam artian sumber daya manusia keuangan/akuntansi tersebut kompeten, maka kualitas laporan keuangan daerah pada Dinas di Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya pun akan memenuhi karakteristik kualitatif

#### H2 : Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat yaitu  $5,649 < 1,6654$  dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dan tingkat kesalahan (alpha) sebesar 0,05. Dari hasil pengujian tersebut, maka terdapat keputusan adalah  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Oleh karena itu, terdapat pengaruh yang signifikan antara Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Sistem berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah karena pada dasarnya sistem akuntansi adalah satu kesatuan yang apabila diterapkan atau ada satu bagian sistem yang tidak diterapkan maka sulit untuk memperoleh karakteristik kualitatif laporan keuangan daerah sesuai SAP yakni relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Pemaparan tersebut didukung oleh Abdul Halim (2002:37) yang menyatakan, untuk dapat menyediakan informasi secara tepat dan akurat dibutuhkan suatu sistem yang dapat digunakan dalam rangka penyediaan informasi.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Devi Roviyantie

(2011) yang menyatakan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. kesignifikanan ini disebabkan karena sistem akuntansi keuangan daerah sudah diterapkan dengan baik oleh dinas-dinas pada Pemerintah kabupaten tasikmalaya, maka kualitas laporan keuangan daerah pun akan semakin baik.

### **H3 : Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah**

Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat yaitu  $-1,907 < 1,6654$  dengan nilai signifikansi sebesar 0,061 dan tingkat kesalahan ( $\alpha$ ) sebesar 0,05. Dari hasil pengujian tersebut, maka terdapat keputusan adalah  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Oleh karena itu, tidak terdapat pengaruh antara sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Sistem pengendalian intern menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi laporan keuangan

pemerintah daerah sejalan dengan masih banyaknya temuan BPK atas lemahnya sistem pengendalian intern yang mengakibatkan kebocoran dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sehingga BPK memberi opini Tidak Wajar (TW) bahkan Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atas sebahagian besar LKPD di indonesia. Sehingga masih perlunya peningkatan terhadap sistem pengendalian intern, karena apabila semakin baik sistem pengendalian intern maka akan berdampak meningkatnya kualitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan.

Penelitian ini didukung oleh penelitian Choirunisah (2008), yang menemukan internal control tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi instansi. Ketidaksignifikanan ini disebabkan oleh masih banyaknya temuan BPK terhadap LKPD mengenai permasalahan terkait kelemahan sistem pengendalian intern.

### **Rangkuman Hasil Pengujian Uji Statistik t**

**Tabel IV.11. Rangkuman Hasil Pengujian Uji Statistik t**

<b>Hipotesis</b>	<b><math>t_{hitung}</math></b>	<b><math>t_{tabel}</math></b>	<b>Sig.</b>	<b>Keterangan</b>
Terdapat pengaruh kompetensi sumber daya manusia kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	2,988	1,6654	0,004<0,05	$H_0$ : Ditolak $H_1$ : Diterima
Terdapat pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	5,649	1,6654	0,000< 0,05	$H_0$ : Ditolak $H_2$ : Diterima

Terdapat pengaruh pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	-1,907	1,6654	0,061<0,05	H <sub>0</sub> : Diterima H <sub>3</sub> : Ditolak
--	--------	--------	------------	---

Sumber : Pengolahan Data Hasil Penelitian

### 3.7 Hasil Pengujian Koefisiensi Determinasi (Adj. R<sup>2</sup>)

**Tabel IV.12 : Hasil Pengujian Koefisien Determinasi Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,745 <sup>a</sup>	,555	,536	2,63111	2,002

Sumber : Pengelolaan Data Hasil Penelitian

Berdasarkan tabel yang diatas, diperoleh nilai R sebesar 0,754 atau 75,4% dan R *Square* (R<sup>2</sup>) sebesar 0,555 atau 55,5%. memberi penjelasan bahwa 55,5% nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah di pengaruhi oleh kompetensi pejabat penatausahaan keuangan, sistem pengendalian intern dan pengawasan keuangan pemerintah sedangkan 44,5% dipengaruhi oleh variabel lainnya. Dari persentase tersebut dapat disimpulkan bahwa masih terdapat faktor individual lain sebesar 44,5% yang bisa dijelaskan oleh variabel yang lain yang dapat mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bagian sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Hasil pengujian validitas menunjukkan item-item yang digunakan untuk mengukur variabel dinyatakan valid dan pengujian reabilitas menunjukkan bahwa alat ukur

yang digunakan dalam penelitian ini reliabel atau dapat dipercaya. Hasil pengujian Normalitas menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan berdistribusi normal dan asumsi klasik menunjukkan bahwa model regresi terbebas dari Multikolinieritas, Autokorelasi dan Heteroskedastisitas

2. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan hasil bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Kuantan Singingi
3. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan hasil bahwa variabel penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Kuantan Singingi
4. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan hasil bahwa variabel pengendalian intern tidak pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan

keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Kuantan Singingi

5. Hasil penelitian Koefesien determinasi atau Adjusted R2 sebesar 0,424 memberi penjelasan bahwa 42,4% kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan pengendalian intern sedangkan 57,6% dipengaruhi oleh variabel lainnya. Dari persentase tersebut dapat disimpulkan bahwa masih terdapat factor-faktor individual lain sebesar 57,6% yang bisa dijelaskan oleh variabel yang lain yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

#### 4.2 Keterbatasan Penelitian

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisir ke semua objek
2. Responden penelitian ini hanya 3 sampai 4 orang pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah, yaitu kasubag keuangan, bendahara, staf pencatatan keuangan/ staf subbagian akuntansi.
3. Kurangnya pemahaman dari responden terhadap pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner serta sikap kepedulian dan keseriusan dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada. Masalah subjektifitas dari responden dapat mengakibatkan hasil penelitian ini rentan

terhadap biasanya jawaban responden.

#### 4.3 Saran

1. Membesar jumlah sampel dan melengkapi metode survey dengan melakukan wawancara
2. Untuk penelitian lain yang serupa dapat dilakukan dengan menambahkan variabel-variabel yang diduga memiliki pengaruh.
3. Memperbaiki terlebih dahulu kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini karena ada sebagian pertanyaan yang sedikit meragukan bagi responden.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2007. *Akuntansi Yayasan dan Lembaga Publik*. Yogyakarta: Erlangga.
- Botutihe, Tutun Hermawanto, 2013 *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi keuangan daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*
- Choirunisah, Fariziah, 2008. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan yang Dihasilkan Sistem Akuntansi Instansi*. Tesis maksu UGM, Yogyakarta.
- Desiana, 2012. *Pengaruh Dukungan Pimpinan dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Informasi Keuangan Daerah*. Jurnal Penelitian Universitas Siliwangi.

- Harto Puji, dan Sukmaningrum Tantriani, 2012. *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah (Studi empiris pada pemerintahan kabupaten dan kota semarang)*. Jurnal Penelitian Universitas Diponegoro.
- Indriantoro, Supomo, 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis, Untuk Akuntansi dan Manajemen*, BPFE, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi Dan Manajemen Daerah*. Andi: Yogyakarta
- Mondy, Wayne. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Erlangga: Jakarta
- Permadi. Angga Dwi, 2013. *Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Studi Kasus Pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat*. Jurnal. Universitas Widyatama. Bandung
- Subaweh imam, dan Nugraheni Purwaniati, 2008. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. Jurnal Ekonomi bisnis No. 1 Vol.13 april 2008. Pasca sarjana universitas gunadarma.
- Sugiyono. 2010. *Metode penelitian bisnis*. Alfabeta : Bandung
- Sulistiyo, Joko. 2010. *6 Hari Jago SPSS*. Cakrawaa: Yogyakarta
- Tanjung, Abdul Hafiz. 2012. *Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua*. Alfabeta. Bandung
- Yuliani, Safrida, 2010. *Pengaruh Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Yang Dihasilkan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Banda Aceh)*. Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi Volume 3, No.2. Juli 2010